

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama yang tersebar di ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang menjadi kekuatan strategis dalam membangun karakter dan identitas bangsa. Namun demikian, di balik potensi positif tersebut, terdapat pula tantangan serius yang harus dihadapi, yakni potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat fanatisme sempit, sikap eksklusif, dan ketidakmampuan sebagian individu dalam menerima perbedaan. Dalam masyarakat yang plural, toleransi dan saling pengertian menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan bangsa (Hasyim & Junaidi, 2023). Lebih lanjut, keberagaman ini tidak cukup hanya diakui secara formal, tetapi harus ditumbuhkan sebagai nilai hidup bersama melalui pendekatan pendidikan yang holistik dan berkesinambungan.

Berdasarkan data dari Dashboard Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian Agama, rerata nasional indeks KUB berada pada kisaran antara 70–80 poin, yang menunjukkan tingkat kerukunan yang cukup tinggi. Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, yang semuanya mencerminkan sikap saling menghargai dan kemampuan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman keyakinan di Indonesia (Kemenag RI, 2024). Nilai ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum memiliki komitmen yang baik terhadap moderasi beragama, meskipun tetap dibutuhkan penguatan dan pembinaan berkelanjutan untuk mencegah munculnya konflik berbasis agama.

Fenomena radikalisme dan intoleransi tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi telah merambah ke lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter yang toleran dan moderat. Husna & Thohir (2020) mengidentifikasi berbagai manifestasi ekstremisme di kalangan peserta didik, mulai dari sikap fanatisme berlebihan, penolakan terhadap budaya sekolah yang dianggap bid'ah, hingga pengajaran agama yang cenderung dogmatis tanpa memberikan ruang berpikir kritis. Kondisi ini diperparah dengan sikap anti-Pancasila dan anti-penghormatan bendera yang mulai muncul di kalangan peserta

didik. Pada berita elektronik Kompas menyebutkan kasus di salah satu sekolah di Jakarta memperlihatkan bagaimana seorang guru melarang peserta didik memilih ketua OSIS yang berbeda agama dengannya, sebuah tindakan diskriminatif yang menunjukkan minimnya pemahaman tentang hidup dalam keberagaman (Kompas.com, 2022). Demikian pula, kasus intoleransi di Gresik yang melibatkan penolakan terhadap peserta didik beragama lain dalam kegiatan keagamaan tertentu, memperlihatkan bagaimana eksklusivisme dan fanatisme agama dapat menciptakan ketegangan sosial bahkan di ruang pendidikan yang seharusnya inklusif dan mendidik untuk saling menghargai (Kompas.id, 2024). Penelitian Alfianur et al. (Alfianur et al., 2024) juga menegaskan bahwa sikap intoleransi bukan hanya terjadi antaragama, tetapi juga intra-agama, seperti penolakan terhadap penggunaan fasilitas ibadah oleh sesama Muslim yang berbeda mazhab, yang menunjukkan pentingnya peran guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai moderasi beragama sebagai bentuk pencegahan terhadap konflik dan disintegrasi sosial. Oleh sebab itu, pendidikan yang berorientasi pada moderasi beragama menjadi sangat urgen untuk diterapkan secara sistematis di sekolah sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa yang majemuk dan damai.

Peningkatan intoleransi dan eksklusivisme merupakan tantangan serius yang dihadapi bukan hanya masyarakat Indonesia tapi masyarakat di seluruh dunia. Radikalisasi, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses ideologis di mana individu mengadopsi pandangan yang semakin ekstrem, menjadi salah satu ancaman utama bagi keamanan global (Borum, 2012). Proses ini telah memicu aksi kekerasan ekstremis di berbagai belahan dunia, seperti yang terjadi dalam serangan teror di Paris (Setiawan, 2022) dan London Bridge (Teh et al., 2021). Ancaman ini tidak hanya terbatas pada ranah publik, tetapi juga telah merambah ke institusi pendidikan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang mengkaji kebijakan kontra-radikalisasi di Eropa (Adebayo, 2021) dan fenomena serupa di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia (Burhanuddin & Ilmi, 2022).

Salah satu konsep kunci yang diusung dalam merawat keberagaman tersebut adalah dengan membangun moderasi beragama. Moderasi beragama bukan berarti menyamakan semua ajaran agama, tetapi bagaimana seseorang menjalankan agamanya secara proporsional, menghargai perbedaan, dan menolak kekerasan atas

nama keyakinan (Ahmad, 2023). Pemerintah Indonesia merespons isu ini dengan mengarusutamakan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Rofiah & Jasminto, 2023). Agenda ini terus diperkuat dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029 yang menargetkan peningkatan kerukunan umat beragama sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan memperkuat literasi dan sikap moderasi beragama melalui pendidikan. Kementerian Agama telah merumuskan empat indikator utama moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Kemenag RI, 2019)(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai moderasi beragama sangat penting untuk ditanamkan sejak usia dini, terutama pada peserta didik tingkat SMP yang berada dalam fase pembentukan karakter dan pencarian identitas diri (Rusuli, 2022). Pada tahap ini, peserta didik sangat rentan terpengaruh oleh lingkungan, media sosial, dan arus informasi global yang tidak selalu sehat (Rosyidah & Ismeirita, 2023). Husna & Thohir (2020) menjelaskan bahwa remaja pada tingkat SMP-SMA berada dalam periode pencarian identitas dengan keraguan terhadap konsep yang diperoleh dari masa kanak-kanak, termasuk keyakinan agama. Fase ini menjadi sangat rentan karena peserta didik mudah terpengaruh oleh pemahaman ekstrem jika tidak mendapat bimbingan yang tepat dan terukur. Oleh karena itu, pendidikan moderasi beragama menjadi instrumen strategis untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam memahami dan menyikapi perbedaan di sekitarnya.

Pentingnya penguatan moderasi beragama telah menjadi fokus utama dalam berbagai literatur terbaru yang menyoroti kompleksitas tantangan toleransi di institusi pendidikan. Penelitian oleh Yudin et al. (2025) menunjukkan bahwa sekolah merupakan garda terdepan dalam menangkal radikalisme, di mana guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peranan kunci sebagai agen moderasi yang bertanggung jawab mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas ke dalam budaya sekolah. Hal ini sejalan dengan kajian Mahrus dan Afandi (2024) yang menegaskan bahwa penanaman nilai toleransi pada jenjang pendidikan dasar merupakan langkah

strategis untuk membentuk fondasi karakter yang kokoh sebelum peserta didik memasuki fase remaja yang lebih rentan terhadap pengaruh eksternal.

Keberhasilan moderasi beragama tidak hanya bertumpu pada institusi pendidikan, melainkan juga sangat bergantung pada ekosistem di sekitarnya. Penelitian oleh Charles et al. (2023) mengungkapkan bahwa keluarga memiliki kontribusi vital sebagai benteng pertama dalam mencegah paparan radikalisme melalui pola asuh yang mengedepankan dialog keagamaan yang terbuka. Di sisi lain, kajian oleh Jasiah et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi nilai moderasi yang bersinergi dengan kearifan lokal sangat efektif dalam merajut kohesi sosial di masyarakat multikultural. Berbagai temuan ini membuktikan bahwa sikap moderasi peserta didik dibentuk oleh interaksi sosial yang berlapis dan kompleks, mulai dari lingkungan domestik hingga ruang publik.

Meskipun berbagai penelitian di atas telah memotret pentingnya peran sekolah, keluarga, dan masyarakat, tinjauan pada lanskap riset saat ini menunjukkan adanya kesenjangan mendesak terkait instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena tersebut. Instrumen kuantitatif yang ada, seperti yang dikembangkan oleh Al Halik et al. (2022) dan Syahid et al. (2024), serta *Moderama Scale* (Prayona & Wahyudi, 2023), umumnya masih mengandalkan format Skala Likert yang menuntut responden menentukan derajat kesetujuan pada pernyataan konseptual yang sering kali bersifat abstrak. Bagi remaja usia SMP, penggunaan skala ini memiliki kelemahan mendasar karena pernyataan yang terlalu teoretis dapat menimbulkan bias ambiguitas bagi peserta didik yang masih dalam tahap transisi kognitif (Amin, 2020). Kondisi ini dipertegas oleh studi bibliometrik Zamroni et al. (2025) yang mengonfirmasi bahwa diskursus moderasi beragama masih didominasi pendekatan kualitatif-deskriptif, sementara inovasi pada metodologi pengukuran kuantitatif yang mampu membedah struktur keyakinan secara mendalam masih terbatas.

Sebagai solusi atas keterbatasan instrumen konvensional tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan instrumen yang beralih dari format skala tunggal menuju Model Multi-Atribut Fishbein. Secara teoretis, Saifuddin Azwar (2022) dalam bukunya *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* menjelaskan bahwa sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling

berinteraksi. Berbeda dengan Skala Likert yang sering kali hanya memotret respons afektif secara umum, penelitian oleh Rabbani et al. (2024) menegaskan bahwa model Fishbein mampu membedah sikap secara lebih diagnostik melalui dua komponen utama yaitu kekuatan keyakinan (*belief*) individu terhadap atribut moderasi dan evaluasi (*evaluation*) subjektif terhadap setiap atribut tersebut. Sejalan dengan argumen Saifuddin Azwar, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan secara spesifik atribut mana yang paling dominan dalam membentuk struktur kognitif peserta didik, dengan mengalikan skor keyakinan dan evaluasi, instrumen ini menghasilkan skor sikap yang jauh lebih presisi dan objektif dibandingkan sekadar mengevaluasi intensitas setuju-tidak setuju pada pernyataan yang abstrak.

Keunggulan metodologis ini diperkuat dengan landasan *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana sikap yang diukur dengan presisi merupakan prediktor utama bagi niat berperilaku (*behavioral intention*) peserta didik di masa depan (Peter & Ibrahim, 2025). Dalam konteks remaja SMP yang sedang dalam fase pencarian identitas, instrumen berbasis Fishbein ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur statis, tetapi juga sebagai instrumen deteksi dini untuk memprediksi kecenderungan perilaku radikal atau intoleran di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Muhibbin et al. (2024) yang menekankan bahwa penguatan nilai religiositas yang diukur melalui dimensi sikap yang tepat dapat berfungsi sebagai kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang efektif untuk mereduksi tindakan berisiko. Dengan demikian, integrasi model Fishbein dalam riset moderasi beragama menawarkan kerangka kerja yang lebih saintifik untuk memahami bagaimana keyakinan keagamaan bertransformasi menjadi niat perilaku nyata di tengah masyarakat yang majemuk.

Implementasi Model Fishbein dalam memprediksi kecenderungan sikap dan perilaku moderasi beragama ini memerlukan validasi pada lingkungan sosial yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Kondisi sosiologis yang menuntut penguatan nilai moderasi ini terlihat jelas dalam konstelasi kependudukan di Indonesia. Secara nasional, proporsi agama di Indonesia menunjukkan mayoritas penduduk beragama Islam sebesar 87,08%, diikuti oleh Kristen 7,40%, Katolik 3,07%, Hindu 1,68%, Buddha 0,71%, Khonghucu 0,03%, serta kepercayaan lainnya 0,03% (Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024). Data ini menegaskan bahwa meskipun Islam menjadi agama mayoritas, keberadaan kelompok agama lain tetap signifikan dan membentuk realitas pluralitas bangsa. Berdasarkan data kependudukan nasional tahun 2024 (Kementerian Agama RI, 2024), DKI Jakarta muncul sebagai salah satu pusat pluralitas agama dengan total penduduk mencapai 11.135.191 jiwa. Meskipun mayoritas penduduk memeluk agama Islam (83,83%), Jakarta menampung populasi non-Muslim dalam jumlah absolut yang sangat besar, yakni sekitar 1,8 juta jiwa yang mencakup pemeluk Kristen (8,61%), Katolik (3,90%), Buddha (3,46%), Hindu (0,18%), serta Khonghucu dan lainnya.

Realitas sosiologis tersebut terepresentasi secara nyata di Jakarta Barat. Menurut BPS Jakarta Barat (Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat, 2024) sebagai wilayah urban yang sangat padat, Jakarta Barat memiliki distribusi penganut agama yang sangat heterogen di delapan kecamatan, di mana wilayah seperti Cengkareng dan Kalideres menunjukkan titik temu antar-komunitas agama yang sangat intens dalam kehidupan sehari-hari. Bagi peserta didik jenjang SMP di Jakarta Barat, kemajemukan ini bukan sekadar konsep teoritis, melainkan lingkungan keseharian yang mereka hadapi di sekolah dan tempat tinggal. Dinamika masyarakat yang sangat majemuk ini menjadikan Jakarta Barat sebagai lokus yang strategis untuk mengukur disposisi sikap moderasi beragama secara autentik.

Berdasarkan urgensi untuk menyediakan instrumen pengukuran yang lebih presisi dan adaptif terhadap perkembangan kognitif remaja, penelitian ini difokuskan pada pengembangan instrumen moderasi beragama berbasis Model Multi-Atribut Fishbein bagi peserta didik SMP di Jakarta Barat. Pemilihan Jakarta Barat sebagai lokus penelitian didasari oleh karakteristik wilayahnya yang sangat heterogen dan dinamis, sehingga memerlukan alat ukur yang mampu memetakan sikap toleransi peserta didik secara akurat di tengah keragaman tersebut. Kehadiran instrumen ini diharapkan memberikan signifikansi praktis bagi praktisi pendidikan dalam merancang intervensi karakter yang berbasis data, sekaligus mengisi kekosongan inovasi metodologis dalam riset pendidikan Islam demi mewujudkan generasi muda yang moderat di tengah bangsa yang majemuk.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada pengembangan dan validasi instrumen pengukuran sikap moderasi beragama yang presisi dan adaptif terhadap perkembangan kognitif remaja. Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka fokus penelitian dibatasi pada aspek-aspek berikut:

1. **Objek Penelitian:** Fokus utama penelitian ini adalah mengembangkan instrumen moderasi beragama berbasis pendekatan Model Multi-Atribut Fishbein yang diperluas dengan kerangka *Theory of Planned Behavior*. Seluruh dimensi moderasi beragama dioperasionalisasikan dengan keempat konstruk TPB, yaitu *Attitude*, *Subjective Norms*, *Perceived Behavioral Control*, dan *Intention*, sehingga setiap dimensi memperoleh dukungan teoritis yang komprehensif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap dimensi, baik keterbukaan intelektual, orientasi etis-kemanusiaan, penerimaan pluralitas budaya dan agama, serta ketahanan terhadap narasi ekstrem tetap diturunkan menjadi perilaku spesifik dengan kerangka ATCT (*Action–Target, Context, Time*). Oleh karena demikian, pengukuran berorientasi pada perilaku nyata peserta didik SMP, sekaligus menjaga konsistensi teoritis dan meningkatkan validitas serta reliabilitas instrumen.
2. **Dimensi dan Atribut Moderasi Beragama:** Konstruk dan indikator moderasi beragama yang akan diukur dalam instrumen ini dikembangkan dan diekstraksi berdasarkan hasil kajian literatur (*literature review*) yang komprehensif. Setiap indikator diturunkan menjadi perilaku spesifik dengan kerangka ATCT (*Action–Target–Context–Time*), sehingga pengukuran tidak hanya bersifat abstrak tetapi berorientasi pada perilaku nyata peserta didik SMP. Dimensi yang digunakan meliputi keterbukaan intelektual, orientasi etis-kemanusiaan, penerimaan pluralitas budaya dan agama, serta ketahanan terhadap narasi ekstrem.
3. **Subjek Penelitian:** Subjek uji coba dan implementasi instrumen ini difokuskan secara spesifik pada peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pemilihan jenjang ini didasarkan pada karakteristik psikologis peserta didik yang sedang berada pada fase pencarian identitas dan transisi kognitif, sehingga rentan terhadap paparan eksklusivisme dan radikalisme.

4. Lokus Penelitian: Penelitian dan pengujian instrumen difokuskan di wilayah Jakarta Barat. Lokus ini dipilih sebagai representasi ideal dari lingkungan masyarakat urban yang memiliki heterogenitas dan kompleksitas sosiologis (agama, suku, dan budaya) yang tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Rumusan masalah disusun untuk mengarahkan tujuan penelitian dalam mengembangkan instrumen pengukuran moderasi beragama yang sesuai dengan karakteristik peserta didik SMP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan dimensi dan indikator yang membentuk konstruk sikap moderasi beragama yang kontekstual bagi peserta didik tingkat SMP?
2. Bagaimana merancang instrumen moderasi beragama berbasis Model Multi-Atribut Fishbein dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* yang sesuai dengan karakteristik peserta didik SMP?
3. Bagaimana mengembangkan instrumen moderasi beragama yang valid dan reliabel?
4. Bagaimana tingkat keterpahaman dan kelayakan penggunaan instrumen moderasi beragama bagi peserta didik SMP?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian pengembangan instrumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara teoretis maupun praktis, dalam upaya penguatan karakter peserta didik. Adapun rincian kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Inovasi Metodologis Pengukuran: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi penelitian pendidikan, khususnya dalam ranah pengukuran afektif. Penggunaan Model Multi-Atribut Fishbein dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* menawarkan kebaruan (*novelty*) untuk mengatasi kelemahan Skala Likert konvensional, sehingga menghasilkan pengukuran sikap moderasi beragama yang lebih presisi, objektif, dan diagnostik.

- b. Pengayaan Literatur Pendidikan Karakter: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan psikologi pendidikan dan pendidikan agama, khususnya Islam, terkait bagaimana struktur kognitif dan keyakinan (*belief*) remaja usia SMP bertransformasi menjadi sikap, norma sosial, persepsi kontrol, dan intensi perilaku dalam konteks masyarakat multikultural. Dengan demikian, penelitian ini menambah perspektif baru dalam literatur pendidikan karakter berbasis TPB.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi Guru (Khususnya Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti):
Menyediakan alat ukur yang valid, reliabel, dan praktis untuk memetakan secara spesifik tingkat pemahaman dan sikap moderasi beragama peserta didik. Hasil pengukuran dari instrumen ini dapat digunakan oleh guru sebagai data diagnostik untuk merancang metode pembelajaran atau intervensi karakter yang lebih tepat sasaran.
- b. Bagi Pihak Sekolah (Tingkat SMP):
Instrumen ini dapat difungsikan sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) untuk memetakan potensi intoleransi, fanatisme sempit, atau eksklusivisme di lingkungan sekolah. Data yang dihasilkan dapat menjadi landasan berbasis bukti (*evidence-based*) bagi sekolah dalam merumuskan kebijakan, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah yang inklusif.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan (Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan):
Memberikan alternatif model instrumen pengukuran sikap yang teruji secara empiris pada demografi urban yang kompleks seperti Jakarta Barat. Model instrumen ini dapat diadaptasi atau dikembangkan lebih lanjut sebagai standar evaluasi keberhasilan program moderasi beragama di tingkat daerah maupun nasional.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya:
Menjadi referensi teoretis maupun metodologis bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) terkait instrumen non-tes, khususnya yang berfokus pada implementasi Model Multi-Atribut Fishbein dan TPB dalam berbagai variabel pendidikan dan psikologi lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Instrumen

1. Pengukuran dan Instrumen Afektif

Pengukuran (*measurement*) merupakan pilar fundamental dalam setiap proses evaluasi pendidikan dan psikologi yang berfungsi untuk mengkuantifikasi atribut atau karakteristik laten individu secara objektif. Walaupun definisi mengenai pengukuran yang diajukan oleh para ahli sangat beragam, esensinya bermuara pada satu pemahaman utama. Merujuk pada pandangan pakar psikometri klasik Nunnally yang dikutip oleh Suryabrata (2005), pengukuran pada intinya terdiri dari aturan-aturan untuk mengenakan bilangan (angka) kepada objek sedemikian rupa guna menunjukkan kuantitas atribut pada objek tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan pedoman *Standards for Educational and Psychological Testing* (American Educational Research Association et al., 2014), proses pengenalan bilangan ini mutlak dilaksanakan melalui prosedur yang terstandar (*standardized procedures*) untuk memperoleh sampel perilaku yang valid serta meminimalkan kesalahan ukur. Oleh karena itu, pengukuran berperan sebagai instrumen penjemabatan metodologis yang mentransformasi fenomena psikologis yang awalnya bersifat kualitatif seperti kecenderungan sikap dan keyakinan peserta didik terkait moderasi beragama menjadi data empiris berupa angka yang presisi, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis statistik yang akurat.

Dalam praktik evaluasi pendidikan, instrumen pengukuran secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, umumnya digunakan oleh pendidik untuk mengukur ranah kognitif atau sejauh mana pengetahuan materi telah dikuasai oleh peserta didik. Sebaliknya, teknik non-tes merupakan instrumen yang mutlak diperlukan untuk mengukur aspek-aspek yang tidak dapat dijangkau oleh tes konvensional, khususnya pada ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Hal ini sejalan dengan pandangan Widiyanto dan Inayati (2023) yang menegaskan bahwa teknik tes digunakan untuk mengetahui pengetahuan kognitif, sedangkan non-tes digunakan untuk mengukur apakah peserta didik sudah bisa menerapkannya dalam aspek sikap dan perilaku. Senada dengan hal tersebut,

Azwar (2022) menyatakan bahwa skala sikap sebagai bagian dari instrumen non-tes tidak memiliki standar jawaban benar atau salah, melainkan bertujuan untuk melihat kecenderungan respons individu. Lebih lanjut, merujuk pada Standards for Educational and Psychological Testing (2014), penggunaan instrumen non-tes dalam mengukur konstruk afektif bertujuan untuk memperoleh gambaran autentik mengenai karakteristik subjek melalui prosedur yang terstandar guna meminimalkan kesalahan ukur.

Meskipun instrumen non-tes merupakan metode yang paling tepat untuk mengukur ranah afektif, pengukurannya memiliki tantangan besar berupa subjektivitas responden dan kecenderungan munculnya *social desirability bias*. Fenomena ini sering terjadi dalam pengukuran nilai-nilai sensitif seperti moderasi beragama, di mana responden mungkin cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial namun tidak mencerminkan sikap aslinya. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Model Multi-Atribut Fishbein yang kemudian diperluas dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Model ini memandang sikap sebagai fungsi dari keyakinan (*belief*) terhadap suatu atribut dan evaluasi (*evaluation*) terhadap pentingnya atribut tersebut (Fishbein & Ajzen, 1975). Dalam kerangka TPB, sikap ini tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) untuk membentuk niat (*intention*) dan akhirnya memprediksi perilaku nyata (*actual behavior*) (Ajzen, 2005).

Dengan demikian, penggunaan Skala Fishbein dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai teknik penskalaan sikap, tetapi juga konsisten dengan kerangka TPB dalam memprediksi kecenderungan perilaku moderasi beragama peserta didik SMP.

2. Prinsip Penskalaan dalam Pengembangan Instrumen

Pemilihan skala dalam pengukuran sikap merupakan aspek metodologis yang sangat penting, karena instrumen yang digunakan harus mampu menangkap kompleksitas konstruk sekaligus konsisten dengan kerangka teoritis yang mendasarinya. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), salah satu pendekatan yang paling relevan adalah skala Fishbein. Fishbein dan Ajzen (1975)

menekankan bahwa sikap terhadap perilaku tidak cukup diukur dengan satu dimensi sederhana, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara keyakinan individu (*belief*) mengenai konsekuensi perilaku dan penilaian individu (*evaluation*) terhadap konsekuensi tersebut. Dengan demikian, sikap dipandang sebagai fungsi dari keyakinan yang dimiliki seseorang tentang suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil yang ditimbulkan. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran sikap yang lebih kaya, karena tidak hanya menilai apakah seseorang setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan, tetapi juga mengaitkan keyakinan dengan bobot evaluatif yang dimiliki responden.

Keunggulan skala Fishbein terletak pada konsistensinya dengan TPB, di mana konstruk utama seperti *attitude toward the behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* semuanya dipandang sebagai hasil interaksi antara keyakinan dan evaluasi, motivasi, atau persepsi kendali. Penelitian mutakhir juga mendukung relevansi pendekatan ini. Penelitian Castanho Silva et al. (2019), menunjukkan bahwa skala multidimensional lebih unggul dalam menangkap kompleksitas sikap politik dibandingkan skala sederhana. Hal ini memperkuat argumen bahwa *Fishbein-style scaling* lebih sesuai untuk konstruk sikap yang kompleks, termasuk dalam konteks pendidikan dan moderasi beragama. Demikian pula, kajian Cruz dan Manata (2020) mengenai pengukuran sikap lingkungan menegaskan bahwa banyak instrumen klasik tidak memiliki validitas struktural yang memadai, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kuat seperti *confirmatory factor analysis* (CFA). Skala Fishbein, dengan struktur interaksi *belief* × *evaluation*, lebih mampu menjawab tuntutan validitas dalam penelitian sikap kontemporer.

Namun, tidak semua konstruk dalam TPB memerlukan skala Fishbein. Konstruk *intention* misalnya, dipandang sebagai konstruk tunggal berupa kesiapan bertindak. Oleh karena itu, *intention* cukup diukur dengan skala Likert, yang meminta responden menyatakan tingkat persetujuan terhadap pernyataan niat atau komitmen. Penelitian Suh dan Ahn (2022) mengenai sikap peserta didik terhadap kecerdasan buatan menunjukkan bahwa skala Likert lima poin efektif dan reliabel untuk konstruk tunggal seperti *intention*, dengan hasil CFA yang memenuhi standar

fit indeks. Hal ini menegaskan bahwa Likert tetap relevan untuk konstruk yang bersifat langsung dan tidak memerlukan interaksi belief $\times$ evaluation.

Selain Fishbein dan Likert, terdapat pula skala sikap lain yang secara historis cukup berpengaruh, yakni Thurstone dan Guttman. Skala Thurstone dikembangkan dengan menggunakan item yang telah diberi bobot nilai oleh panel ahli, sehingga memiliki validitas isi yang tinggi. Namun, proses konstruksinya relatif rumit dan memerlukan keterlibatan ahli dalam penentuan nilai, sehingga jarang digunakan dalam penelitian mutakhir. Sementara itu, skala Guttman menyusun item secara hierarkis sehingga jawaban responden menunjukkan tingkat sikap secara kumulatif. Model ini efektif untuk konstruk yang bersifat linear, tetapi kurang sesuai untuk konstruk sikap yang kompleks dan multidimensional. Dengan demikian, meskipun skala Thurstone dan Guttman memiliki nilai historis dalam perkembangan metodologi pengukuran sikap, relevansi praktisnya dalam penelitian kontemporer relatif terbatas (Devellis & Carolyn T. Thorpe, 2022).

Secara keseluruhan, penggunaan skala Fishbein dalam pengembangan instrumen moderasi beragama berbasis TPB dapat dipandang sebagai pilihan metodologis yang tepat. Skala ini tidak hanya konsisten dengan definisi konstruk dalam TPB, tetapi juga mampu menangkap kompleksitas sikap secara lebih mendalam. Sementara itu, skala Likert tetap digunakan untuk intention karena sifatnya yang tunggal dan langsung. Kombinasi keduanya menghasilkan instrumen yang komprehensif, valid, dan relevan untuk konteks pendidikan di tingkat SMP.

3. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (Ajzen, 1991) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang berakar pada Model Multi-Atribut Fishbein. Model Fishbein memandang sikap sebagai fungsi dari keyakinan terhadap suatu atribut dan evaluasi terhadap pentingnya atribut tersebut (Fishbein & Ajzen, 1975). TRA kemudian menegaskan bahwa niat berperilaku merupakan hasil dari sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Namun, TRA memiliki keterbatasan karena hanya dapat memprediksi perilaku yang sepenuhnya berada dalam kendali individu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Ajzen menambahkan konstruk *perceived behavioral control* (PBC), sehingga TPB mampu menjelaskan perilaku yang tidak sepenuhnya berada dalam

kendali individu (Ajzen, 2005). Dengan demikian, TPB menjadi kerangka teoritik yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek personal (sikap), sosial (norma subjektif), dan kontrol (PBC) dalam memprediksi niat serta perilaku nyata.

Dalam kerangka TPB, niat (*intention*) dipandang sebagai prediktor langsung perilaku. Niat ini terbentuk dari tiga determinan utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991). Sikap terhadap perilaku merupakan evaluasi individu terhadap suatu perilaku, apakah dipandang positif atau negatif. Sikap ini dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu *behavioral beliefs* dan *outcome evaluation*. Behavioral beliefs adalah keyakinan individu bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi tertentu, sedangkan outcome evaluation adalah penilaian individu terhadap konsekuensi tersebut, apakah dianggap menguntungkan atau merugikan. Ajzen merumuskan hubungan ini dalam bentuk

$$A_o = \sum_{i=1}^n b_i e_i$$

di mana sikap terhadap perilaku merupakan hasil perkalian antara kekuatan keyakinan (b_i) dan evaluasi terhadap konsekuensi (e_i). Dengan demikian, sikap bukan sekadar preferensi emosional, melainkan hasil kalkulasi kognitif antara apa yang diyakini akan terjadi dan bagaimana individu menilai hasil tersebut (Fishbein & Ajzen, 1975). Sejalan dengan itu, Saifuddin Azwar (2022) menegaskan bahwa sikap merupakan predisposisi atau kecenderungan yang relatif menetap untuk merespons secara positif atau negatif terhadap objek tertentu. Sikap terdiri atas tiga komponen utama, yaitu komponen kognitif (keyakinan atau pengetahuan individu terhadap objek), komponen afektif (perasaan atau evaluasi emosional terhadap objek), dan komponen konatif (kecenderungan perilaku atau kesiapan bertindak). Dengan demikian, pembentukan sikap dalam TPB melalui belief dan evaluation sejalan dengan pandangan Azwar bahwa sikap adalah hasil interaksi antara aspek kognitif, afektif, dan konatif yang saling memengaruhi.

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial dari orang-orang signifikan (*significant others*) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif terbentuk dari *normative beliefs*, yaitu keyakinan bahwa orang-orang yang penting bagi individu misalnya orang tua, guru, atau teman

sebagai mengharapkan dirinya melakukan perilaku tertentu, serta *motivation to comply*, yaitu sejauh mana individu termotivasi untuk mematuhi harapan tersebut (Ajzen, 2005). Dengan demikian, norma subjektif mencerminkan sejauh mana individu merasa terdorong oleh lingkungan sosial untuk menampilkan perilaku tertentu.

Perceived behavioral control (PBC) adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan melakukan suatu perilaku. PBC terbentuk dari *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku, serta *perceived power*, yaitu kekuatan yang dirasakan dari masing-masing faktor tersebut. PBC menggambarkan perasaan *self-efficacy* atau kemampuan diri individu dalam melakukan suatu perilaku, yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, ketersediaan sumber daya, dan hambatan eksternal (Ajzen, 2005). Dalam kerangka TPB, PBC tidak hanya memengaruhi niat, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku secara langsung, terutama ketika individu memiliki kontrol nyata terhadap pelaksanaan perilaku (Ajzen, 1991).

Sejumlah penelitian telah mendukung relevansi TPB dalam menjelaskan perilaku berbasis nilai. La Barbera dan Ajzen (2020, 2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi PBC, semakin kuat hubungan antara sikap dan niat, sementara pengaruh norma subjektif terhadap niat justru melemah. Temuan ini menegaskan bahwa individu yang merasa memiliki kontrol tinggi lebih mengandalkan sikap pribadi daripada tekanan sosial dalam membentuk niat berperilaku. Sartika (2020) menambahkan bahwa sikap tidak selalu konsisten dengan perilaku, sehingga TPB diperlukan untuk menjelaskan kesenjangan tersebut. Penelitian Muhibbin et al. (2024) juga mendukung kerangka TPB dengan menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik berpengaruh negatif terhadap niat mengonsumsi alkohol, sekaligus menurunkan sikap mendukung alkohol, norma subjektif, dan kontrol perilaku internal. Hasil serupa ditemukan oleh Amin (2020) dalam konteks pariwisata serta Peter dan Ibrahim (2025) dalam konteks penggunaan TikTok, yang menegaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku bersama-sama memengaruhi niat dan perilaku nyata. Dengan demikian, TPB terbukti relevan dalam berbagai domain perilaku, baik yang bersifat konsumtif, religius, maupun digital, sehingga

memperkuat validitasnya sebagai kerangka teoritik yang dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku moderasi beragama pada peserta didik SMP.

Dalam konteks pengembangan instrumen moderasi beragama, TPB memberikan kerangka yang komprehensif. Sikap terhadap nilai moderasi perlu diukur bersama norma subjektif dan PBC. Dengan demikian, instrumen tidak hanya memotret sikap, tetapi juga memprediksi niat dan perilaku moderasi beragama secara lebih autentik.

4. Model dan Prosedur Pengembangan Instrumen

Prosedur pengembangan instrumen dalam penelitian ini mengadopsi model 4D (*Define, Design, Develop, dan Disseminate*) yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974). Pemilihan model ini didasarkan pada karakteristik alur kerjanya yang sistematis namun fleksibel untuk pengembangan perangkat pendidikan. Sebagaimana dikaji dalam tinjauan literatur oleh Indaryanti et al. (2025), model 4D tetap menjadi rujukan utama dalam riset pengembangan karena kemampuannya menjamin kualitas produk melalui fase evaluasi yang terperinci di setiap tahapannya.

a. Tahap Pendefinisian (*Define*)

Tahap awal ini merupakan fase untuk menetapkan dan mendefinisikan persyaratan instruksional. Thiagarajan et al. (1974) menekankan bahwa sebelum produk dirancang, peneliti harus melakukan analisis ujung depan (*front-end analysis*) dan analisis tugas guna mengidentifikasi masalah dasar yang ingin diselesaikan. Dalam penelitian ini, fase *define* diwujudkan melalui pemetaan indikator moderasi beragama yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan sekolah. Urgensi ini selaras dengan argumen Minhaji et al. (2025) bahwa ketiadaan instrumen atau media yang terstandar dapat menghambat pemahaman moderasi beragama pada peserta didik. Lebih lanjut, Rahmanita et al. (2023) menambahkan bahwa analisis terhadap karakteristik psikologis subjek sangat krusial agar instrumen yang dikembangkan benar-benar fungsional dan relevan dengan profil pengguna.

b. Tahap Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan merupakan fase penyusunan rancangan awal instrumen atau prototype berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Thiagarajan et al. (1974)

menekankan bahwa tahap ini mencakup pemilihan format, struktur, dan rancangan awal yang sesuai dengan tujuan pengembangan. Dalam penelitian ini, rancangan instrumen disusun dengan mengacu pada kerangka Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) dan Model Multi-Atribut Fishbein (1975). Setiap butir instrumen dirancang untuk merepresentasikan tiga konstruk utama TPB, yaitu:

- a. Sikap terhadap perilaku (*attitude*), yang dioperasionalisasikan melalui behavioral beliefs dan outcome evaluation.
- b. Norma subjektif (*subjective norms*), yang dioperasionalisasikan melalui normative beliefs dan motivation to comply.
- c. *Perceived behavioral control* (PBC), yang dioperasionalisasikan melalui *control beliefs* dan *perceived power*.

Cetak biru (*blueprint*) instrumen disusun dengan memperhatikan indikator dari ketiga konstruk tersebut, sehingga setiap butir memiliki landasan teoretis yang jelas. Suadi et al. (2025) menegaskan bahwa rancangan produk harus memiliki kerangka konseptual yang kuat agar instrumen dapat memotret konstruk secara valid. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Azwar (2022) dalam psikometri, yang menekankan bahwa objektivitas skala sikap sangat bergantung pada kejelasan format, konsistensi indikator, dan konstruksi butir yang dirancang secara sistematis. Dengan demikian, tahap design tidak hanya menghasilkan draf instrumen, tetapi juga memastikan bahwa rancangan awal memiliki dasar konseptual dan psikometrik yang jelas sebelum masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut.

c. Tahap Pengembangan (*Develop*)

Fase pengembangan dilakukan untuk menghasilkan produk final yang telah melalui proses modifikasi. Thiagarajan et al. (1974) membagi tahap ini ke dalam dua aktivitas utama, yaitu penilaian ahli (*expert appraisal*) dan uji coba pengembangan (*developmental testing*). Pada praktiknya, instrumen moderasi beragama ini terlebih dahulu divalidasi oleh pakar materi dan evaluasi pendidikan. Minhaji et al. (2025) menunjukkan bahwa validasi ahli merupakan parameter kritis untuk memastikan produk memenuhi standar kelayakan teoretis sebelum diuji ke lapangan. Setelah valid secara konten, dilakukan uji coba lapangan untuk mengukur reliabilitas empiris. Rahmanita et al. (2023) mempertegas bahwa pengujian statistik

pada tahap ini berfungsi untuk membuktikan efektivitas instrumen dalam memotret perubahan sikap atau kondisi psikologis responden secara konsisten.

d. Tahap Penyebaran (*Disseminate*)

Tahap terakhir menurut Thiagarajan et al. (1974) adalah penyebaran, yang berfokus pada pengemasan, validasi pengujian akhir, dan difusi produk kepada pengguna yang lebih luas. Instrumen moderasi beragama yang telah dinyatakan valid secara teoretis dan reliabel secara empiris kemudian difinalisasi sebagai produk akhir. Sebagaimana hasil riset Amilia et al. (2023), keberhasilan diseminasi sebuah model evaluasi diukur dari kemampuannya memetakan atribut prioritas bagi pengguna, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai draf penelitian, namun menjadi alat ukur yang aplikatif bagi praktisi pendidikan dalam memantau sikap moderasi beragama secara nasional.

B. Konsep Variabel yang Diukur

1. Definisi Moderasi Beragama

Secara terminologi, moderasi beragama merupakan proses memahami serta mengamalkan ajaran agama secara adil dan berimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan. Kementerian Agama RI (2019) menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah memoderasi ajaran agama itu sendiri, melainkan memoderasi cara pandang dan perilaku pemeluknya agar tetap berada di jalur tengah. Sebagaimana dijelaskan dalam studi Lukmanul Hakim et al. (2023), meskipun istilah ini masif dipromosikan sebagai program nasional sejak 2019, esensinya telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW sebagai upaya menjalin hubungan sosial yang harmonis dan damai di tengah keberagaman bangsa Indonesia, jauh sebelum istilah ini masif dipromosikan sebagai program nasional.

Perspektif teologis yang kuat mengenai konsep ini dikemukakan oleh M. Quraish Shihab (2019) melalui konsep *Wasathiyyah*, yang memaknai moderasi sebagai titik keseimbangan antara dua kutub ekstrem yang saling berlawanan. Penegasan ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang menempatkan *wasathiyyah* sebagai karakteristik esensial Islam (*khasha'is al-Islam*) yang menyeimbangkan antara aspek akal dan wahyu, sebagaimana dikaji oleh Sumbulah et al. (2021), pandangan Al-Qardhawi mengenai *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah* (praktik Nabi yang tidak terkait hukum tetap) memberikan ruang bagi fleksibilitas

dan adaptasi kontekstual dalam beragama, yang menjadi fondasi penting dalam membangun moderasi di tengah perubahan zaman. Lebih lanjut, moderasi didefinisikan sebagai komitmen etis untuk menjunjung tinggi keadilan moral di atas formalisme teks. Menurut Ansori (2022), dalam meninjau pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl, moderasi adalah kesadaran intelektual untuk menolak otoritarianisme tafsir dan mengedepankan nilai kasih sayang sebagai inti dari kehendak Tuhan. Pandangan ini, sebagaimana ditegaskan oleh Fanani & Iswanto (2023), menjadi fondasi utama bagi masyarakat inklusif yang terbuka terhadap dialog pluralisme dan menolak cara berpikir kaku yang menutup diri dari realitas sosial.

Perspektif lintas agama menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama sejatinya bersifat universal. Dalam tradisi Kekristenan, hukum kasih Yesus menekankan cinta kasih dan penghormatan terhadap sesama sebagai dasar kehidupan beriman (Prakosa, 2022). Dalam Hindu, konsep menyama braya mengajarkan bahwa semua orang dipandang sebagai saudara, sehingga perbedaan tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun (Fiani et al., 2024). Sementara dalam Budha, prinsip karuṇa (welas asih) dan majjhima-paṭipada (jalan tengah) menolak segala bentuk ekstremisme dan mendorong terciptanya kehidupan damai (Amri, 2021). Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai nilai lintas agama yang menekankan keseimbangan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Sebagai variabel penelitian, konsep ini dioperasionalisasikan melalui struktur sikap yang komprehensif, sehingga relevan untuk peserta didik SMP dari berbagai latar belakang agama.

Sebagai sebuah variabel yang diukur dalam penelitian ini, definisi moderasi beragama dipahami melalui struktur sikap yang komprehensif. Merujuk pada pemikiran Saifuddin Azwar (2022), sikap terhadap moderasi beragama mencakup tiga komponen utama, yaitu komponen kognitif (keyakinan dan pemahaman), komponen afektif (evaluasi perasaan), dan komponen konatif (kecenderungan berperilaku). Sikap ini dioperasionalisasikan melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), sehingga pengukuran dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan *Attitude toward the behavior* yang diukur melalui behavioral beliefs dan outcome evaluation terhadap atribut moderasi beragama, *Subjective*

norms yang diukur melalui *normative beliefs* serta *motivation to comply*, *perceived behavioral control* (PBC) yang diukur melalui *control beliefs* dan *perceived power*, serta *Intention* yang terbentuk dari ketiga konstruk tersebut, dan diukur melalui pernyataan niat peserta didik untuk bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai sikap normatif, tetapi juga sebagai konstruk psikologis yang dapat diukur melalui dimensi TPB. Hal ini memungkinkan instrumen penelitian menangkap secara lebih komprehensif bagaimana keyakinan, norma sosial, dan persepsi kontrol berkontribusi terhadap niat dan perilaku moderasi beragama pada peserta didik SMP.

2. Landasan Sosiologis Moderasi Beragama

Moderasi beragama dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang majemuk, di mana keberagaman agama, budaya, dan identitas menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pluralisme sebagai perspektif sosiologis menekankan penerimaan terhadap perbedaan sebagai kekayaan sosial, bukan ancaman. Dalam masyarakat plural, setiap kelompok memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga harmoni, sehingga perbedaan dipandang sebagai modal sosial yang memperkuat kohesi masyarakat (A. Azra, 2006; Parekh, 2000).

Selain itu, multikulturalisme memberikan penekanan pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan, serta perlunya kebijakan pendidikan yang inklusif. Multikulturalisme tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mendorong interaksi yang setara antar kelompok, sehingga integrasi sosial dapat terbangun secara kokoh (Banks, 2009; Parekh, 2000). Dalam konteks pendidikan, sekolah dipandang sebagai ruang multikultural yang menjadi arena sosialisasi nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan moderasi beragama dapat dipahami sebagai strategi untuk memperkuat kohesi sosial sekaligus mengurangi potensi diskriminasi dan eksklusivisme di lingkungan sekolah.

Lebih jauh, pluralisme dan multikulturalisme juga memiliki relevansi historis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol penerimaan terhadap keberagaman sebagai dasar persatuan. Dalam kerangka ini, moderasi beragama bukanlah konsep baru,

melainkan kelanjutan dari tradisi sosial dan politik bangsa yang menekankan harmoni dalam perbedaan. Dengan demikian, pengembangan instrumen moderasi beragama bagi peserta didik SMP harus berakar pada landasan sosiologis ini, agar instrumen tidak hanya mengukur sikap individual, tetapi juga mencerminkan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

3. Karakteristik Peserta Didik SMP

a. Karakteristik Perkembangan Umum

Peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada dalam rentang usia remaja awal, yaitu sekitar 12–15 tahun. Pada masa ini, peserta didik mengalami perubahan perkembangan yang kompleks, mencakup aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kepribadian dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Sulaiman et al., 2020).

Secara fisik, remaja mengalami percepatan pertumbuhan yang pesat (pubertas), seperti bertambahnya tinggi dan berat badan, perubahan bentuk tubuh, dan munculnya ciri-ciri seksual sekunder. Menurut teori tugas perkembangan dari Robert Havighurst, pada masa ini individu dihadapkan pada tugas perkembangan berupa menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis yang terjadi dengan cepat (Sulaiman et al., 2020). Proses adaptasi terhadap perubahan fisik ini sering kali menyebabkan kecemasan, penurunan kepercayaan diri, atau bahkan krisis identitas apabila tidak dibarengi dengan dukungan lingkungan.

Dalam aspek kognitif, peserta didik usia SMP umumnya telah memasuki tahap operasional formal menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Pada tahap ini, individu mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Mereka mulai bisa memahami konsep-konsep moral, berpikir tentang masa depan, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan, dan mengembangkan kemampuan berpikir hipotetis-deduktif (Sulaiman et al., 2020). Namun demikian, penggunaan kemampuan berpikir abstrak ini belum selalu konsisten dalam semua konteks, tergantung pada pengalaman dan lingkungan belajar.

Dalam aspek psikososial, menurut Erik Erikson, remaja awal berada pada tahap perkembangan identitas versus kebingungan identitas (*identity vs. role*

confusion). Tahap ini merupakan masa pencarian jati diri, di mana individu mulai mengembangkan pemahaman tentang siapa dirinya, nilai-nilai yang diyakininya, dan peran sosial yang akan diambil. Jika lingkungan sosial terutama keluarga dan sekolah tidak memberikan ruang dan dukungan, maka remaja berisiko mengalami kebingungan identitas (Sulaiman et al., 2020). Oleh karena itu, pendampingan dan penguatan karakter menjadi aspek penting dalam pendidikan remaja usia SMP.

Dengan memahami ketiga aspek perkembangan tersebut, pendidik dan orang tua dapat memberikan perlakuan serta pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Hal ini penting sebagai dasar dalam membina karakter, menanamkan nilai-nilai positif, serta mencegah munculnya perilaku negatif di kalangan remaja, termasuk dalam konteks pendidikan agama dan sosial.

b. Perkembangan Moral dan Keagamaan

Peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada pada fase perkembangan yang penting dalam pembentukan karakter moral dan keagamaan. Masa ini sering disebut sebagai remaja awal, di mana anak mulai meninggalkan cara berpikir kanak-kanak dan menuju kedewasaan. Perkembangan moral dan keagamaan dalam fase ini sangat menentukan arah kepribadian seseorang di masa depan, terutama dalam membentuk integritas pribadi, empati sosial, dan kedalaman spiritual. Oleh karena itu, pendidikan agama pada jenjang ini harus difokuskan pada upaya membangun kesadaran moral-spiritual peserta didik, bukan sekadar pemberian materi kognitif. Melalui pembelajaran yang holistik, peserta didik diarahkan untuk tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Muslihudin, 2023).

Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg menjadi salah satu fondasi utama dalam memahami bagaimana peserta didik SMP memaknai nilai-nilai baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori Kohlberg dalam Karlina et al. (2023) membagi perkembangan moral menjadi tiga tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Pada tingkat prakonvensional, perilaku individu didasarkan pada kepentingan pribadi dan menghindari hukuman, misalnya melalui fase orientasi hukuman dan fase orientasi instrumental. Di tingkat konvensional, yang umum dialami peserta didik usia SMP,

pertimbangan moral didasarkan pada penerimaan sosial dan kepatuhan terhadap aturan, terbagi dalam orientasi hubungan interpersonal dan orientasi hukum serta aturan. Sedangkan pada tingkat pascakonvensional, penilaian moral sudah bersandar pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan hak asasi manusia, yakni melalui fase kontrak sosial dan etika universal. Karlina et al. (2023) menegaskan bahwa perkembangan moral ini erat kaitannya dengan aspek kognitif dan intelektual, serta sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam pendidikan, guru memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga membentuk moral peserta didik melalui keteladanan, pembiasaan, dan dialog nilai. Selain itu, Kohlberg juga menjelaskan bahwa moralitas membutuhkan proses pembelajaran yang menyentuh tiga aspek, yaitu sikap moral, perasaan moral, dan pemikiran moral, yang ketiganya harus dibangun secara terpadu agar peserta didik mampu mengambil keputusan yang tidak hanya rasional tetapi juga etis. Aplikasi teori ini dalam dunia pendidikan menuntut peran aktif guru dalam menyusun pembelajaran yang mengintegrasikan kognitif, afektif, dan moral, misalnya melalui kegiatan simulasi dilema moral, diskusi kelompok, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Dengan pendekatan seperti ini, peserta didik tidak hanya belajar memahami nilai, tetapi juga mengalami dan menjalankan nilai tersebut dalam kehidupannya.

Selain aspek moral, perkembangan keberagamaan peserta didik SMP dapat dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Perkembangan Iman (*Stages of Faith*) dari James W. Fowler. Fowler memandang iman bukan hanya sebagai konten agama, melainkan sebagai cara seseorang memberi makna pada hidupnya. Berdasarkan teori ini, peserta didik usia SMP umumnya berada pada masa transisi menuju Tahap 3, yaitu *Synthetic-Conventional Faith* (James W. Fowler, 1981). Pada tahap ini, iman remaja memiliki karakteristik utama berupa konformitas sosial, di mana keyakinan mereka sangat dipengaruhi oleh kelompok sebaya (*peers*) dan tokoh idola. Mereka cenderung mengadopsi sistem keyakinan lingkungan sosialnya untuk mendapatkan pengakuan atau *sense of belonging*. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik SMP memiliki kerentanan psikologis untuk mengikuti arus, jika lingkungannya radikal, mereka berpotensi terpapar fanatisme, namun jika diarahkan pada moderasi, fase ini menjadi momentum emas untuk menanamkan sikap toleran yang kuat.

Sejalan dengan hal itu, perkembangan keagamaan peserta didik SMP merupakan proses penting yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga afektif dan perilaku. Pada masa remaja awal, peserta didik mulai membentuk kesadaran spiritual yang dapat berkembang menjadi nilai-nilai keagamaan yang membatin. Oleh karena itu, pendidikan agama harus difokuskan pada upaya membangun kesadaran beragama yang menyentuh aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. Muslihudin (2023) menjelaskan bahwa pembelajaran agama yang efektif harus diarahkan pada pembentukan moral-spiritual artikulatif, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengenali, menyadari, dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Konsep ini menekankan pentingnya pembelajaran agama yang tidak hanya mengajarkan isi ajaran, tetapi juga membangun pengalaman spiritual yang otentik, sehingga peserta didik mampu menginternalisasi nilai keimanan dan takwa sebagai dasar perilaku sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik SMP berada pada fase perkembangan yang sangat strategis sekaligus kritis. Melalui kacamata teori moral Kohlberg dan teori iman Fowler, dipahami bahwa peserta didik berada pada tahap konvensional, yang menjadikan penerimaan sosial, konformitas kelompok, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai orientasi utama. Kondisi psikologis ini menuntut pendidikan agama yang berperan sentral dalam menanamkan nilai-nilai yang tidak dogmatis, melainkan mendorong peserta didik menjadi pribadi yang reflektif. Dalam konteks moderasi beragama, pemahaman terhadap fase perkembangan ini menjadi dasar pengembangan instrumen evaluasi dan pola pembinaan yang tepat, guna membentuk sikap keberagamaan yang inklusif, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Dalam kerangka TPB, karakteristik perkembangan remaja awal ini dipetakan sebagai konstruk *Perceived Behavioral Control* (PBC). Keyakinan peserta didik mengenai kemampuan dirinya untuk bersikap moderat (*control beliefs*) serta persepsi terhadap kekuatan pengaruh lingkungan (*perceived power*) menjadi faktor penting dalam menentukan niat berperilaku moderat. Dengan demikian, aspek perkembangan fisik, kognitif, moral, dan keagamaan tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga berfungsi sebagai variabel psikologis yang memengaruhi persepsi kontrol perilaku dalam kerangka TPB.

4. Dimensi Moderasi Beragama bagi Peserta Didik SMP

Dimensi moderasi beragama bagi peserta didik SMP dalam penelitian ini diturunkan dari pemikiran tokoh Islam kontemporer seperti Quraish Shihab, Yusuf al-Qardhawi, dan Khaled Abou El-Fadl, yang menekankan pentingnya keseimbangan (*wasathiyyah*), keterbukaan, dan penghormatan terhadap keragaman. Meskipun berakar dari tradisi Islam, nilai moderasi yang terkandung di dalamnya sejatinya bersifat universal dan juga ditemukan dalam ajaran agama lain, karena setiap agama pada dasarnya menekankan keseimbangan, perdamaian, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan oleh Khairul Amri (2021), prinsip moderasi beragama hadir dalam setiap tradisi keagamaan dan menjadi fondasi penting bagi terciptanya kerukunan dalam masyarakat plural. Fokus dimensi ini diarahkan pada dimensi psikososial peserta didik, sehingga lebih operasional untuk mengukur sikap individu dalam konteks pendidikan agama Islam. Empat dimensi utama yang dirumuskan adalah keterbukaan intelektual, orientasi etis-kemanusiaan, penerimaan pluralitas budaya dan agama, serta ketahanan terhadap narasi ekstrem. Keempat dimensi tersebut sekaligus diintegrasikan dengan dimensi moderasi beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dengan integrasi ini, instrumen yang dikembangkan tidak hanya memiliki landasan teoritis dari literatur akademik, tetapi juga relevansi kebijakan nasional, sehingga memperkuat validitas isi dan memastikan keterpaduan antara kerangka konseptual dan kebijakan pendidikan moderasi beragama.

a. Keterbukaan Intelektual

Keterbukaan intelektual merupakan sikap menerima pluralitas tafsir, rendah hati dalam berdialog, dan tidak memaksakan kebenaran tunggal. Khaled Abou El-Fadl (2001) menolak otoritarianisme tafsir yang menutup ruang interpretasi, dan menawarkan hermeneutika anti-otoritarian yang menekankan kejujuran, rasionalitas, serta keterbukaan. Sikap ini menjadi fondasi penting dalam membangun moderasi beragama, karena membuka ruang bagi perbedaan pandangan tanpa harus menimbulkan konflik.

Ansori (2022) menegaskan bahwa hermeneutika Abou El-Fadl dapat menjadi kerangka membangun moderasi beragama di tengah masyarakat yang plural. Nur Kholis dan Aulassyahied (2023) juga menekankan bahwa syariah humanistik Abou El-Fadl merupakan upaya konkret untuk mengatasi otoritarianisme dalam penafsiran hukum Islam. Dengan demikian, keterbukaan intelektual bukan hanya gagasan teoritis, tetapi juga strategi praktis untuk menumbuhkan sikap moderat di kalangan peserta didik.

Dalam kerangka moderasi beragama, keterbukaan intelektual diwujudkan melalui sikap menerima perbedaan tafsir sebagai bagian dari dinamika keilmuan Islam, menghargai dialog sebagai sarana mencari kebenaran bersama, serta tidak memaksakan pendapat pribadi sebagai satu-satunya kebenaran. Dimensi ini secara langsung beririsan dengan indikator toleransi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI (Kemenag RI, 2019). Toleransi menurut Kemenag menekankan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, sikap saling menghormati, dan penerimaan terhadap keragaman sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Dengan demikian, keterbukaan intelektual dalam penelitian ini tidak hanya berakar pada teori kontemporer, tetapi juga memperkuat indikator kebijakan nasional tentang toleransi, sehingga instrumen yang dikembangkan memiliki relevansi akademik sekaligus kebijakan.

b. Orientasi etis-kemanusiaan

Orientasi etis-kemanusiaan didefinisikan sebagai sikap mengutamakan nilai kemanusiaan, empati sosial, dan kepedulian terhadap sesama di atas perbedaan identitas. Dalam kerangka moderasi beragama, orientasi ini menegaskan bahwa praktik keberagamaan harus menghadirkan kemaslahatan universal, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks.

Yusuf al-Qardhawi melalui gagasan *Fiqh al-Awlawiyyat* (1995) menekankan pentingnya menempatkan prioritas dalam beragama. Ia membedakan antara sunnah yang bersifat mengikat (*tasyri'iyah*) dan sunnah yang fleksibel (*ghairu tasyri'iyah*), sehingga umat tidak terjebak pada kekakuan tekstual. Prinsip ini menunjukkan bahwa inti ajaran agama adalah menghadirkan *maslahah* (*kemaslahatan umum*) dan menolak sikap berlebihan (*ghuluw*) yang menyalahi maqashid syariah. Nilai kemanusiaan yang ditegaskan al-Qardhawi adalah bahwa

syariat harus membawa manfaat bagi manusia, menjaga keadilan sosial, dan menolak praktik keberagamaan yang menimbulkan penderitaan atau diskriminasi.

Kajian Sumbulah, Zainuddin, dan Bawazier (2021) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa pembagian sunnah oleh al-Qardhawi merupakan strategi moderasi agar umat tidak terjebak pada kekakuan tekstual. Izzan (2021) menambahkan bahwa ekstremisme beragama bertentangan dengan maqashid syariah, karena mengabaikan nilai kemanusiaan dan keseimbangan. Dengan landasan ini, orientasi etis-kemanusiaan menjadi jalan tengah yang menolak radikalisme dan menegaskan bahwa beragama harus berpihak pada kemaslahatan manusia secara universal.

Dalam kerangka moderasi beragama, orientasi etis-kemanusiaan diwujudkan melalui sikap empati sosial terhadap sesama, kepedulian lintas agama sebagai implementasi nilai kemaslahatan universal, serta penolakan terhadap diskriminasi yang dapat melahirkan ketidakadilan sosial. Dimensi ini beririsan langsung dengan indikator komitmen kebangsaan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI (Kemenag RI, 2019). Komitmen kebangsaan menekankan bahwa praktik keberagamaan harus mendukung persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan menimbulkan perpecahan. Dengan demikian, orientasi etis-kemanusiaan dalam penelitian ini tidak hanya berakar pada teori maqashid syariah dan literatur akademik, tetapi juga memperkuat indikator kebijakan nasional tentang komitmen kebangsaan. Hal ini menjadikan instrumen yang dikembangkan relevan sekaligus kontributif terhadap agenda pendidikan moderasi beragama di Indonesia.

c. Penerimaan pluralitas budaya dan agama

Penerimaan pluralitas budaya dan agama didefinisikan sebagai sikap positif terhadap keragaman tradisi, simbol, dan ritual lokal sebagai bagian dari sunnatullah. Quraish Shihab (2019) menegaskan bahwa keragaman adalah sunnatullah yang harus diterima sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Sikap ini menjadi fondasi penting dalam moderasi beragama, karena menekankan bahwa perbedaan adalah sesuatu yang alami dan harus dihargai.

Menurut Izzan (2021), tafsir kontemporer menegaskan bahwa moderasi beragama bergerak dari pendekatan teologi-mazhab menuju teologi-humanis.

Pergeseran ini tampak dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab yang menekankan penerimaan terhadap keragaman sebagai bagian dari sunnatullah. Dengan demikian, penerimaan pluralitas budaya dan agama dipahami bukan sekadar wacana, melainkan praktik keberagaman yang moderat dan relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Abdul Kahar (2025) menekankan bahwa kearifan lokal merupakan strategi penting dalam pelatihan moderasi beragama, karena nilai-nilai budaya seperti *pela gandong* dan *masohi* telah lama berfungsi sebagai perekat sosial lintas agama. Pendekatan berbasis kearifan lokal membuat moderasi beragama lebih relevan, mudah diterima, dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, Nurkilat Andiono (2024) menunjukkan bahwa konstruksi pendidikan moderasi beragama di pesantren Nurul Jadid Probolinggo juga berbasis pada kearifan lokal, melalui prinsip *Panca Kesadaran* dan *Trilogi Santri* yang menanamkan sikap moderat, inklusif, dan toleran pada santri.

Dalam kerangka moderasi beragama, penerimaan pluralitas diwujudkan melalui sikap menghargai tradisi lokal sebagai bagian dari identitas bangsa, menerima simbol budaya sebagai ekspresi keragaman, serta tidak merasa terancam oleh perbedaan yang ada di masyarakat. Dimensi ini secara langsung beririsan dengan indikator akomodatif terhadap budaya lokal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI (Kemenag RI, 2019). Indikator Kemenag menekankan pentingnya penghargaan terhadap tradisi dan kearifan lokal sebagai bagian dari praktik moderasi beragama. Dengan integrasi ini, penerimaan pluralitas budaya dan agama dalam penelitian tidak hanya memperkuat landasan akademik dari tokoh Islam kontemporer, tetapi juga mendukung kebijakan nasional yang menekankan akomodasi budaya lokal sebagai strategi moderasi. Hal ini menjadikan instrumen yang dikembangkan lebih kontekstual, relevan, dan berkelanjutan dalam pendidikan peserta didik SMP.

d. Ketahanan terhadap narasi ekstrem

Ketahanan terhadap narasi ekstrem adalah kemampuan individu untuk menolak ajakan kekerasan, ujaran kebencian, dan provokasi radikal, serta memilih jalan damai sebagai alternatif. Dalam kerangka moderasi beragama, ketahanan ini berarti memiliki daya tangkal terhadap ideologi yang menyimpang dari prinsip

keseimbangan (*wasathiyyah*), sehingga peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh narasi intoleran yang beredar di lingkungan sosial maupun media digital.

Quraish Shihab (2019) menekankan *wasathiyyah* sebagai penangkal ekstremisme, yaitu sikap tengah yang menolak kekerasan dan mengedepankan kedamaian. Yusuf al-Qardhawi melalui fleksibilitas sunnah menegaskan bahwa beragama tidak boleh terjebak pada kekakuan yang bisa melahirkan radikalisme. Sementara itu, Khaled Abou El-Fadl (2001) menolak tafsir otoritarian yang sering menjadi pintu masuk radikalisme, sehingga membuka ruang bagi keberagaman yang lebih moderat dan dialogis.

Ansori (2022) menegaskan bahwa hermeneutika Abou El-Fadl relevan untuk membangun moderasi beragama yang menolak kekerasan dan mengedepankan dialog. Nur Kholis dan Aulassyahied (2023) menunjukkan bahwa syariah humanistik Abou El-Fadl merupakan kerangka etis-spiritual aktif yang dapat menjadi penangkal radikalisme. Kajian-kajian ini memperkuat bahwa ketahanan terhadap narasi ekstrem bukan hanya sikap defensif, tetapi juga kemampuan aktif untuk memilih jalan damai dan menolak ideologi intoleran.

Dalam kerangka moderasi beragama, ketahanan terhadap narasi ekstrem diwujudkan melalui sikap menolak ujaran kebencian, tidak mudah terprovokasi oleh ajakan radikal, serta memilih jalan damai sebagai bentuk komitmen terhadap nilai moderasi. Peserta didik yang memiliki ketahanan ini akan mampu menjaga diri dari pengaruh ideologi ekstrem, sekaligus menjadi agen perdamaian di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dimensi ini secara langsung beririsan dengan indikator anti-kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI (Kemenag RI, 2019).. Indikator Kemenag menekankan pentingnya menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, serta mengedepankan penyelesaian konflik secara damai. Integrasi ini menunjukkan bahwa ketahanan terhadap narasi ekstrem dalam penelitian tidak hanya berakar pada teori kontemporer dan literatur akademik, tetapi juga memperkuat kebijakan nasional tentang anti-kekerasan. Dengan demikian, instrumen yang dikembangkan memiliki relevansi ganda: secara teoritis mendukung kerangka *wasathiyyah* dan secara praktis mendukung agenda kebijakan pendidikan moderasi beragama di Indonesia.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), konstruk yang digunakan untuk mengoperasionalkan indikator moderasi beragama dipilih secara selektif sesuai relevansi perilaku yang diukur. Tidak semua indikator memerlukan ketiga konstruk utama sekaligus (*attitude toward the behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*). Misalnya, indikator keterbukaan intelektual lebih tepat diukur melalui *Attitude* dan *Subjective Norms*, sedangkan indikator ketahanan terhadap provokasi lebih relevan dengan *Perceived Behavioral Control*. Demikian pula, indikator memilih jalan damai lebih sesuai dengan konstruk *Intention*. Dengan pendekatan modular ini, instrumen menjadi lebih adaptif dan mengurangi risiko item tidak valid atau reliabel. Sejalan dengan Ajzen (1991, 2005), niat (*intention*) tetap dipandang sebagai prediktor utama perilaku, namun terbentuk dari kombinasi konstruk yang relevan dengan konteks indikator moderasi beragama, bukan dari penerapan seragam ke semua dimensi. Hal ini sejalan dengan temuan Fishbein & Ajzen (2010) yang menekankan bahwa pemilihan konstruk harus mempertimbangkan konteks perilaku spesifik, serta Rabbani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan skala Fishbein secara modular meningkatkan validitas pengukuran sikap pada remaja.

C. Konsep Analisis Data yang Digunakan

Analisis data dalam penelitian pengembangan instrumen moderasi beragama untuk peserta didik SMP dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan teori pengukuran psikometri. Tujuan utama analisis adalah memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, serta mampu menggambarkan secara akurat konstruk sikap moderasi beragama sesuai indikator yang telah dirumuskan. Seperti ditegaskan oleh Nunnally & Bernstein (1994), instrumen yang baik harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas agar dapat digunakan secara konsisten dalam mengukur konstruk psikologis. Hal ini sejalan dengan pandangan DeVellis & Carolyn T. (2022) yang menekankan bahwa pengembangan skala bertujuan menghasilkan alat ukur yang sahih dan andal, sehingga mampu merepresentasikan konstruk secara tepat dalam konteks penelitian. Oleh karena itu, analisis data mencakup beberapa konsep penting, yaitu validitas isi, validitas konstruk,

reliabilitas, analisis deskriptif, serta pendekatan teori respons butir (*Item Response Theory/IRT*).

1. Validitas Isi (*Content Validity*)

Validitas isi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengembangan instrumen, karena memastikan bahwa butir-butir yang disusun benar-benar mewakili konstruk yang hendak diukur. Menurut Lynn (1986), validitas isi adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana item dalam instrumen mencerminkan domain konten yang relevan. Haynes et al. (1995) menambahkan bahwa validitas isi harus menghubungkan teori dengan operasionalisasi indikator, sehingga setiap butir instrumen memiliki dasar konseptual yang jelas.

Dalam konteks penelitian ini, validitas isi dilakukan melalui penilaian pakar (*expert judgment*) yang menilai kesesuaian setiap item dengan indikator moderasi beragama yang telah dirumuskan, yaitu keterbukaan intelektual, orientasi etis-kemanusiaan, penerimaan pluralitas budaya dan agama, serta ketahanan terhadap narasi ekstrem. Proses ini tidak hanya memastikan relevansi isi, tetapi juga mengurangi kemungkinan bias konseptual dalam instrumen.

Metode kuantitatif yang digunakan untuk menilai validitas isi adalah Aiken's V (Aiken, 1985; Azwar, 2012). Aiken's V memungkinkan peneliti menghitung tingkat kesepakatan antar pakar mengenai relevansi item, dengan nilai $\geq 0,70$ dianggap memadai dan nilai $\geq 0,80$ menunjukkan validitas isi yang sangat baik. Dengan demikian, validitas isi berfungsi sebagai fondasi awal yang menjamin bahwa instrumen sah secara teoritis sebelum diuji lebih lanjut melalui validitas konstruk dan reliabilitas.

2. Validitas Konstruk (*Construct Validity*)

Validitas konstruk merupakan inti dari pengembangan instrumen psikologis dan pendidikan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa butir-butir instrumen benar-benar mencerminkan konstruk yang hendak diukur. Cronbach & Meehl (1955) menegaskan bahwa validitas konstruk adalah proses untuk menguji hubungan antara indikator empiris dengan konsep teoritis yang mendasarinya. Dengan kata lain, validitas konstruk menunjukkan sejauh mana instrumen mampu merepresentasikan dimensi konseptual yang telah dirumuskan dalam kerangka teori.

Dalam praktiknya, validitas konstruk biasanya diuji melalui analisis faktor. *Exploratory Factor Analysis* (EFA) digunakan untuk mengeksplorasi struktur laten dari data, sehingga dapat diketahui apakah item-item instrumen mengelompok sesuai dengan dimensi teoritis yang diharapkan. Hair et al. (2019) menekankan bahwa EFA merupakan teknik utama dalam mengidentifikasi struktur konstruk, dengan kriteria seperti nilai factor loading $\geq 0,40$ sebagai indikator keterhubungan item dengan faktor tertentu. Setelah struktur faktor terbentuk, *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dapat digunakan untuk menguji kesesuaian model teoritis dengan data empiris. Byrne (2010) menjelaskan bahwa CFA memungkinkan peneliti menguji hipotesis tentang hubungan antarvariabel laten dan indikatornya, sehingga validitas konstruk dapat dipastikan secara lebih kuat.

Dengan demikian, validitas konstruk tidak hanya berfungsi sebagai uji statistik, tetapi juga sebagai jembatan antara teori dan data empiris. Instrumen yang memiliki validitas konstruk yang baik akan mampu mengukur sikap moderasi beragama secara konsisten sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan, yaitu keterbukaan intelektual, orientasi etis-kemanusiaan, penerimaan pluralitas budaya dan agama, serta ketahanan terhadap narasi ekstrem.

3. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas instrumen merupakan aspek penting dalam pengembangan alat ukur, karena menunjukkan konsistensi internal dan kestabilan hasil pengukuran. Menurut Nunnally & Bernstein (1994), reliabilitas adalah sejauh mana suatu instrumen dapat menghasilkan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Instrumen yang reliabel akan meminimalkan kesalahan pengukuran (*measurement error*) dan memberikan keyakinan bahwa skor yang diperoleh benar-benar mencerminkan konstruk yang diukur.

Dalam konteks skala Fishbein, yang menghasilkan skor komposit dari perkalian antara keyakinan (*belief*) dan evaluasi (*evaluation*), reliabilitas tetap dapat diuji dengan koefisien Cronbach's Alpha. DeVellis (2022) menjelaskan bahwa Cronbach's Alpha merupakan teknik yang relevan untuk instrumen berbasis skala sikap, karena fokus pada konsistensi internal antarbutir dalam satu konstruk. Nilai Alpha $\geq 0,70$ dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik, sedangkan nilai $\geq 0,80$ menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi.

Selain Cronbach's Alpha, reliabilitas juga dapat dianalisis dengan pendekatan lain, seperti *split-half reliability* atau *test-retest reliability*. Anastasi & Urbina (1997) menekankan bahwa reliabilitas yang tinggi merupakan syarat mutlak agar instrumen dapat digunakan secara praktis dalam penelitian maupun asesmen psikologis. Dengan demikian, reliabilitas instrumen berfungsi sebagai jaminan bahwa alat ukur yang dikembangkan dapat digunakan secara konsisten untuk menggambarkan sikap moderasi beragama peserta didik SMP, meskipun format skala yang digunakan adalah skala Fishbein dengan kerangka TPB.

4. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden serta distribusi jawaban terhadap item instrumen. Menurut Sugiyono (2013), analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga peneliti dapat melihat pola-pola dasar sebelum melakukan analisis lanjutan. Creswell (2012) menambahkan bahwa analisis deskriptif berfungsi untuk merangkum data kuantitatif melalui ukuran-ukuran statistik seperti mean, median, standar deviasi, dan distribusi frekuensi, sehingga peneliti memperoleh gambaran awal mengenai kecenderungan respon.

Dalam penelitian pengembangan instrumen sikap moderasi beragama, analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui kecenderungan respon peserta didik SMP terhadap setiap butir pernyataan. Data dapat disajikan dalam bentuk frekuensi, persentase, mean, median, dan standar deviasi, sehingga peneliti memperoleh gambaran mengenai tingkat moderasi beragama secara umum. Gravetter & Wallnau (2017) menekankan bahwa ukuran-ukuran statistik deskriptif tersebut membantu peneliti memahami distribusi data dan kecenderungan pusat, sehingga interpretasi terhadap sikap responden menjadi lebih akurat. Misalnya, nilai rata-rata yang tinggi pada indikator keterbukaan intelektual menunjukkan bahwa peserta didik cenderung memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan.

Selain itu, analisis deskriptif juga berfungsi sebagai langkah awal untuk memeriksa kualitas data. Melalui analisis ini, peneliti dapat mendeteksi adanya outlier, pola jawaban yang tidak konsisten, atau distribusi data yang tidak normal. Creswell (2012) menegaskan bahwa pemeriksaan kualitas data merupakan bagian

penting dari analisis deskriptif, karena memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis lanjutan benar-benar mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya. Dengan demikian, analisis deskriptif tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga berperan sebagai kontrol kualitas data sebelum masuk ke tahap analisis psikometrik yang lebih kompleks.

5. Analisis Teori Respons Butir (*Item Responses Theory/IRT*)

Teori Respons Butir (*Item Response Theory/IRT*) merupakan pendekatan modern dalam analisis psikometrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas butir instrumen secara lebih mendalam. Berbeda dengan teori tes klasik (*Classical Test Theory/CTT*) yang hanya menekankan skor total dan reliabilitas keseluruhan, IRT memandang bahwa probabilitas respon peserta terhadap suatu item dipengaruhi oleh tingkat kemampuan laten (*latent trait*) yang dimiliki responden serta karakteristik item itu sendiri (Embretson & Reise, 2000; Hambleton et al., 1991). Dengan demikian, IRT tidak hanya memberikan informasi mengenai konsistensi instrumen secara umum, tetapi juga menyoroti bagaimana setiap butir berfungsi dalam mengukur konstruk yang diinginkan.

Embretson dan Reise (2000) menekankan bahwa keunggulan IRT terletak pada kemampuannya memberikan estimasi parameter butir yang lebih akurat, sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana suatu item mampu membedakan responden dengan tingkat kemampuan berbeda. Hambleton, Swaminathan, dan Rogers (1991) menambahkan bahwa IRT juga menyediakan fungsi informasi tes (*test information function*) yang menunjukkan tingkat keakuratan pengukuran pada berbagai level konstruk. Selain itu, IRT memungkinkan deteksi terhadap butir yang tidak berfungsi optimal, misalnya item yang terlalu mudah, terlalu sulit, atau tidak mampu membedakan responden.

Dalam konteks pengembangan instrumen sikap moderasi beragama, penerapan IRT penting karena dapat memastikan bahwa setiap butir instrumen benar-benar berkontribusi pada pengukuran konstruk yang diinginkan. Dengan demikian, instrumen tidak hanya reliabel secara keseluruhan, tetapi juga valid pada level butir. Hal ini menjadikan IRT sebagai pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan teori tes klasik, terutama untuk instrumen sikap yang menggunakan skala bertingkat seperti skala Fishbein.

6. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahap di mana peneliti memberikan makna terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. Menurut Creswell (2012), interpretasi data tidak hanya berhenti pada penyajian angka atau statistik, tetapi juga harus dikaitkan dengan konteks penelitian, teori yang mendasari, serta tujuan instrumen yang dikembangkan. Dengan demikian, interpretasi menjadi proses menghubungkan temuan empiris dengan kerangka konseptual yang telah dibangun sebelumnya.

Dalam penelitian pengembangan instrumen sikap moderasi beragama, interpretasi data dilakukan dengan cara menelaah hasil analisis deskriptif dan psikometrik seperti validitas, reliabilitas, serta analisis IRT untuk menjawab pertanyaan penelitian (Embretson & Reise, 2000). Interpretasi juga harus mempertimbangkan keterbatasan penelitian. Gravetter & Wallnau (2017) menekankan bahwa statistik hanya memberikan gambaran probabilistik, sehingga peneliti perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Oleh karena itu, interpretasi data harus dilakukan secara kritis, dengan mengaitkan hasil analisis pada teori moderasi beragama, literatur psikometrik, serta konteks pendidikan SMP di Indonesia.

D. Penskoran Hasil Pengukuran

1. Penskoran Konstruk TPB

Penskoran hasil pengukuran dalam penelitian ini dilakukan untuk mengoperasionalkan konstruk-konstruk utama dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), yaitu *attitude toward the behavior*, *subjective norms*, *perceived behavioral control*, dan *intention* (Ajzen, 1991). Setiap konstruk diukur melalui komponen keyakinan dan evaluasi yang relevan, kemudian dikonversi ke skor numerik berdasarkan prinsip ekspektasi-nilai (*expectancy-value model*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Dengan demikian, penskoran tidak hanya menggambarkan jawaban responden secara kategoris, tetapi juga memungkinkan analisis kuantitatif yang lebih mendalam terhadap kecenderungan sikap peserta didik SMP.

Instrumen penelitian ini menggunakan skala Fishbein adaptasi 1–5. Skala ini dipilih karena lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik peserta didik SMP.

Dengan lima kategori jawaban, responden lebih mudah membedakan tingkat keyakinan maupun evaluasi dibandingkan skala tujuh poin, sementara validitas dan reliabilitas pengukuran tetap terjaga. Francis et al. (2004) menegaskan bahwa skala 5 maupun 7 poin sama-sama sah digunakan dalam pengukuran TPB, dan pemilihan jumlah kategori sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik responden. Sementara itu, Lozano et al. (2008) menunjukkan secara empiris bahwa skala 5 poin tetap menghasilkan reliabilitas dan validitas yang tinggi, tidak berbeda signifikan dengan skala 7 poin.

Berbeda dengan konstruk utama, intention dipandang sebagai konstruk tunggal berupa kesiapan bertindak. Oleh karena itu, intention diukur dengan skala Likert lima poin, yang meminta responden menyatakan tingkat persetujuan terhadap pernyataan niat atau komitmen. Pemilihan skala Likert untuk intention didasarkan pada kesederhanaannya, sehingga sesuai dengan karakteristik peserta didik SMP, sekaligus tetap menjaga validitas pengukuran. Penelitian Suh dan Ahn (2022) menunjukkan bahwa skala Likert lima poin efektif dan reliabel untuk konstruk tunggal seperti intention, dengan hasil *confirmatory factor analysis* (CFA) yang memenuhi standar fit indices. Hal ini sejalan dengan pandangan Francis et al. (2004) yang menegaskan bahwa skala lima maupun tujuh poin sama-sama sah digunakan dalam pengukuran TPB, sehingga pemilihan jumlah kategori sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik responden.

Kombinasi penggunaan skala Fishbein untuk konstruk utama dan skala Likert untuk intention, instrumen penelitian ini mampu menangkap kompleksitas sikap secara komprehensif sekaligus mengukur niat berperilaku secara sederhana namun tetap sah.

Selanjutnya, setiap konstruk TPB dijelaskan secara rinci berikut mekanisme penskorannya:

a. *Attitude toward the Behavior*

Attitude toward the behavior merujuk pada evaluasi individu terhadap suatu perilaku, apakah dianggap positif atau negatif. Sikap terbentuk dari kombinasi antara kekuatan keyakinan (*behavioral beliefs*, *bi*) dan evaluasi konsekuensi (*outcome evaluation*, *ei*).

- 1) Skala keyakinan (b_i): 1–5.
- 2) Skala evaluasi (e_i): 1–5.
- 3) Penskoran: dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian keyakinan dengan evaluasi.

Tabel 2.1 Skor Keyakinan dan Evaluasi Skala Fishbein

Skor Keyakinan & Evaluasi		Label Kategori	
Favorable	Unfavorable	Keyakinan	Evaluasi
1	5	Sangat tidak yakin	Sangat buruk
2	4	Tidak yakin	Buruk
3	3	Netral	Netral
4	2	Yakin	Baik
5	1	Sangat yakin	Sangat Baik

b. *Subjective Norms*

Subjective norms merujuk pada persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif terbentuk dari keyakinan normatif (*normative beliefs*, n_i) dan motivasi untuk mematuhi (*motivation to comply*, mc).

- 1) Skala *normative beliefs* (n_i): 1–5.
- 2) Skala *motivation to comply* (mc): 1–5.
- 3) Penskoran: dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari *normative beliefs* dan *motivation to comply*.

Tabel 2.2 Skor *Normative Beliefs* dan *Motivation to Comply*

Skor Keyakinan & Motivasi		Label Kategori	
Favorable	Unfavorable	<i>Normative Beliefs</i>	<i>Motivation to Comply</i>
1	5	Sangat tidak setuju	Sangat tidak termotivasi
2	4	Tidak setuju	Tidak termotivasi
3	3	Netral	Netral
4	2	Setuju	Termotivasi
5	1	Sangat Setuju	Sangat termotivasi

c. *Perceived Behavioral Control* (PBC)

Perceived behavioral control merujuk pada persepsi individu mengenai kemampuan untuk mengendalikan suatu perilaku. PBC terbentuk dari keyakinan kontrol (*control beliefs*, c_i) dan persepsi kekuatan (*perceived power*, p_i).

- 1) Skala *control beliefs* (c_i): 1–5.
- 2) Skala *perceived power* (p_i): 1–5.
- 3) Penskoran: dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian *control beliefs* dan *perceived power*.

Tabel 2.3 Skor *Control Beliefs* dan *Perceived Power*

Skor Keyakinan & Persepsi Kekuatan		Label Kategori	
Favorable	Unfavorable	<i>Control Beliefs</i>	<i>Perceived Power</i>
1	5	Sangat tidak yakin	Sangat menghambat
2	4	Tidak yakin	Menghambat
3	3	Netral	Netral
4	2	Yakin	Tidak menghambat
5	1	Sangat yakin	Sangat tidak menghambat

d. *Intention*

Intention merujuk pada niat individu untuk melakukan suatu perilaku. Dalam TPB, *intention* merupakan outcome dari *attitude*, *subjective norms*, dan PBC.

- 1) Skala *intention*: 1–5
- 2) Penskoran: dihitung dengan menjumlahkan skor butir niat secara langsung.

Tabel 2.4 Skor *Intention*

Skor Niat		Label Kategori
Favorable	Unfavorable	
1	5	Sangat tidak berniat
2	4	Tidak berniat
3	3	Netral
4	2	Berniat
5	1	Sangat berniat

e. Interpretasi skor

Sebelum interpretasi dilakukan, skor mentah dari setiap konstruk TPB dinormalisasi ke skala 1–5. Normalisasi ini memastikan bahwa hasil pengukuran dapat dibandingkan secara adil antar konstruk, sekaligus menjaga konsistensi struktural instrumen. Cruz dan Manata (2020) menekankan bahwa transformasi skor diperlukan agar instrumen sikap memiliki struktur yang konsisten dan dapat dibandingkan antar konstruk. Dengan demikian, normalisasi skor bukan sekadar prosedur teknis, melainkan langkah metodologis untuk memastikan validitas interpretasi hasil pengukuran sikap peserta didik SMP terhadap moderasi beragama. Normalisasi dilakukan dengan rumus interval yaitu:

$$\text{Interval} : \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dengan skor maksimum = 25, skor minimum = 1, dan jumlah kategori = 5, maka diperoleh:

$$\text{Interval} : \frac{25-1}{5} = \frac{24}{5} = 4,8$$

Sehingga skor mentah dipetakan ke skor normalisasi 1–5 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Skor Normalisasi

Skor Mentah	Skor Normalisasi (1–5)
1,00 – 5,80	1
5,81 – 10,60	2
10,61 – 15,40	3
15,41 – 20,20	4
20,21 – 25,00	5

Skor total dari seluruh konstruk TPB pada semua dimensi moderasi beragama diinterpretasikan dengan kategori berikut:

Tabel 2.6 Interpretasi Skor

Skor Rata-rata (1–5)	Kategori	Interpretasi
1,00 – 2,33	Rendah	Sikap moderasi beragama masih lemah; peserta didik cenderung eksklusif, kurang terbuka terhadap ide baru, sulit menerima keberagaman, dan rentan terhadap pengaruh narasi ekstrem. Perlu pembinaan intensif untuk menumbuhkan keterbukaan, empati, serta kemampuan berpikir kritis.
2,34 – 3,66	Sedang	Sikap moderasi cukup berkembang; peserta didik mulai menunjukkan keterbukaan dan kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, serta mulai menerima pluralitas. Namun, konsistensi masih belum stabil, sehingga dalam situasi tertentu peserta didik bisa goyah atau ragu. Perlu penguatan melalui pembiasaan dan dialog yang berkelanjutan.
3,67 – 5,00	Tinggi	Sikap moderasi beragama sudah kuat; peserta didik terbuka terhadap ide baru, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menerima keberagaman budaya dan agama dengan sikap positif, serta kritis terhadap narasi ekstrem. Profil ini menunjukkan kesiapan peserta didik menjadi teladan dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Interpretasi ini berlaku untuk skor pada keseluruhan indikator maupun konstruk yang diukur dengan membagi rata-rata dari jumlah atribut yang ada. Dengan demikian, hasil penskoran dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tingkat kecenderungan sikap peserta didik SMP terhadap moderasi beragama,

sekaligus memetakan dimensi atau indikator yang paling dominan dalam membentuk niat berperilaku.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian mengenai moderasi beragama telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan psikometrik, seperti Rasch, *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), model Plomp, maupun skala klasik seperti Thurstone. Penelitian Zufriani et al. (2022) dan Syahid et al. (2024), misalnya, menegaskan pentingnya instrumen moderasi beragama yang valid dan reliabel, dengan fokus pada populasi mahasiswa didik dan sampel lintas agama. Temuan mereka memberikan dasar metodologis yang kuat, tetapi konteksnya masih terbatas pada jenjang pendidikan tinggi. Celah ini membuka peluang bagi pengembangan instrumen serupa di tingkat SMP, di mana karakteristik perkembangan remaja menuntut pendekatan yang lebih kontekstual.

Penelitian lain di madrasah juga menunjukkan arah yang sama. Firdaus & Ulfah (2024) mengintegrasikan nilai moderasi dalam pembelajaran fikih di MTs, sementara Rofi'ah & Jasminto (2023) mengembangkan instrumen literasi moderasi di MI. Keduanya menegaskan relevansi moderasi dalam pendidikan, tetapi masih terbatas pada mata pelajaran tertentu atau aspek literasi. Adaptasi ke jenjang SMP dengan kerangka Fishbein memungkinkan pengukuran sikap moderasi secara lintas mata pelajaran, sekaligus menangkap interaksi antara keyakinan dan evaluasi peserta didik terhadap nilai moderasi.

Kajian Al Halik et al. (2022) dan Latifa et al. (2022) memperlihatkan bahwa instrumen sikap moderasi dapat dikembangkan dengan skala Thurstone maupun CFA, menghasilkan validitas dan reliabilitas tinggi. Namun, pendekatan tersebut lebih menekankan pada penilaian pakar atau struktur faktor, bukan pada bagaimana peserta didik sendiri membentuk keyakinan dan evaluasi. Di sinilah kerangka Fishbein menawarkan keunggulan, karena memungkinkan pengukuran sikap berdasarkan kalkulasi kognitif peserta didik sendiri.

Selain itu, penelitian tipologi moderasi yang dilakukan Burhanudin dan Ilmi (2022) maupun indikator moderasi yang dilakukan oleh Ali (2020) memberikan kerangka konseptual yang kaya, tetapi belum banyak diadaptasi untuk remaja SMP. Gunada et al. (2024) bahkan menegaskan perlunya instrumen yang mampu

mengukur internalisasi nilai moderasi dalam proses pendidikan, karena implementasi kebijakan moderasi masih menghadapi kendala. Hal ini semakin menegaskan urgensi pengembangan instrumen berbasis Fishbein di SMP.

Pada aspek metodologis, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan skala Likert, Rasch, CFA, atau Thurstone. Belum ada kajian yang secara eksplisit menggunakan skala Fishbein untuk mengukur moderasi beragama. Padahal, Fishbein memiliki keunggulan dalam mengoperasionalkan sikap melalui kombinasi keyakinan (*beliefs*) dan evaluasi (*evaluation*), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Kajian Dani Sartika (2020), Mohammad Amin (2020), dan Nike Anita Putri & Firmansyah (2021) menunjukkan bahwa kerangka TRA/TPB efektif menjelaskan perilaku konsumen maupun sikap sosial, sementara penelitian Elyanna Takung Peter & Ibrahim (2025) serta La Barbera & Ajzen (2020) menegaskan fleksibilitas TPB dalam menjelaskan perilaku generasi muda. Bahkan, Dort et al. (2022) berhasil mengembangkan instrumen sikap guru terhadap anak ADHD dengan dasar teori Fishbein dan Ajzen, membuktikan relevansi model ini dalam konteks pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu telah memberikan landasan metodologis yang kuat, tetapi masih menyisakan celah pada jenjang SMP. Instrumen moderasi beragama berbasis skala Fishbein hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut, dengan menekankan interaksi antara keyakinan dan evaluasi peserta didik terhadap nilai moderasi. Dengan demikian, instrumen ini tidak hanya melengkapi kajian yang ada, tetapi juga menawarkan kontribusi metodologis baru yang lebih sesuai dengan karakteristik perkembangan remaja SMP.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari konteks sosial Indonesia yang majemuk, di mana keberagaman budaya, suku, dan agama menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Fenomena intoleransi di sekolah menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama belum sepenuhnya terinternalisasi di kalangan remaja. Meskipun Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2024 menunjukkan tingkat kerukunan yang cukup tinggi, masih terdapat kasus diskriminasi dan eksklusivisme di lingkungan pendidikan

yang menandakan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan peserta didik.

Dalam kerangka tersebut, Landasan Sosiologis Moderasi Beragama menjadi pijakan penting. Pluralisme menekankan penerimaan terhadap perbedaan sebagai kekayaan sosial (Azra, 2006; Parekh, 2000), sedangkan multikulturalisme menegaskan perlunya pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan melalui pendidikan yang inklusif (Banks, 2009). Sekolah sebagai ruang multikultural menjadi arena sosialisasi nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

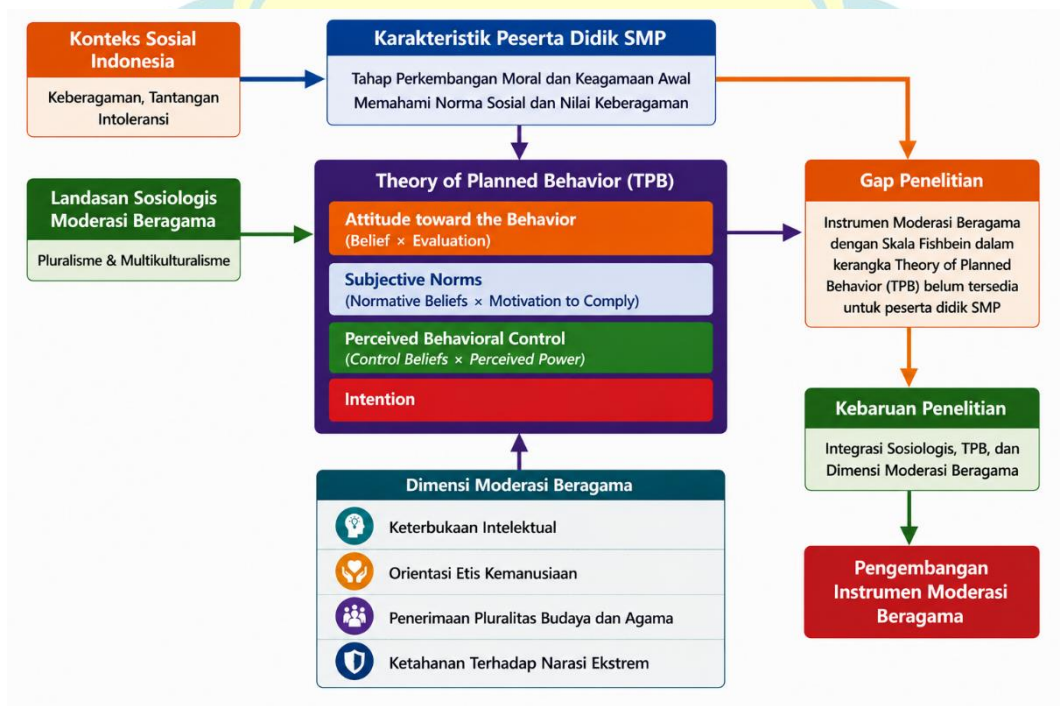
Selanjutnya, karakteristik peserta didik SMP menjadi titik sentral. Peserta didik usia 12–15 tahun berada pada fase remaja awal dengan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial yang kompleks. Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg (1984) dan teori iman Fowler (1981), remaja SMP berada pada tahap konvensional dan *synthetic-conventional faith*, di mana perilaku dan keyakinan mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kelompok sebaya.

Untuk menjawab kebutuhan pengukuran sikap moderasi beragama pada peserta didik SMP, penelitian ini menempatkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai kerangka utama. TPB menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku terbentuk dari *behavioral belief* (keyakinan terhadap konsekuensi perilaku) dan *outcome evaluation* (penilaian terhadap baik-buruknya konsekuensi). Selain itu, norma subjektif (*subjective norms*) dibentuk oleh *normative beliefs* (keyakinan bahwa orang signifikan mengharapkan perilaku tertentu) dan *motivation to comply* (motivasi untuk mengikuti harapan tersebut). Sementara itu, *perceived behavioral control* (PBC) mencerminkan keyakinan individu terhadap faktor pendukung atau penghambat (*control beliefs*) serta kekuatan pengaruhnya (*perceived power*). Ketiga konstruk tersebut secara bersama-sama memengaruhi niat (*intention*) untuk berperilaku, yang pada gilirannya menentukan perilaku aktual (*behavior*) (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengembangkan instrumen moderasi beragama dengan pendekatan Rasch, CFA, dan model Plomp, namun sebagian besar berfokus pada mahapeserta didik atau madrasah. Belum ada instrumen yang secara khusus dirancang untuk peserta didik SMP dengan menggunakan kerangka

TPB. Gap penelitian ini menjadi dasar bagi kebaruan penelitian, yaitu pengembangan instrumen moderasi beragama berbasis Model Multi-Atribut Fishbein dalam kerangka TPB.

Kebaruan penelitian terletak pada integrasi antara landasan sosiologis (pluralisme dan multikulturalisme) dengan kerangka psikologis TPB. Instrumen yang dikembangkan diharapkan mampu mengukur sikap moderasi beragama secara lebih presisi, reliabel, dan kontekstual sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik SMP, sekaligus relevan dengan realitas sosial Indonesia yang plural dan multikultural.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pengembangan Instrumen Moderasi Beragama